

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA
MENJALANI PIDANA
(Studi Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara)**

***LEGAL CERTAINTY OF ADMINISTRATIVE APPEALS
REGARDING DISMISSAL OF CIVIL SERVANTS AFTER
SERVING A CRIMINAL SENTENCE
(A Study of the Decision of the State Civil Service Advisory Board)***



**Oleh:
YULI MEGA ANGGRAENI
NIM. 2410622063**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA
MENJALANI PIDANA
(Studi Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara)**

***LEGAL CERTAINTY OF ADMINISTRATIVE APPEALS
REGARDING DISMISSAL OF CIVIL SERVANTS AFTER
SERVING A CRIMINAL SENTENCE
(A Study of the Decision of the State Civil Service Advisory Board)***



**Oleh:
YULI MEGA ANGGRAENI
NIM. 2410622063**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

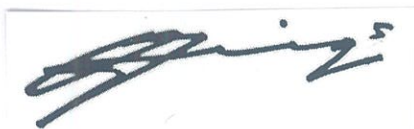
KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MENJALANI PIDANA (Studi Putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara)

Disusun dan diajukan oleh:
YULI MEGA ANGGRAENI
NIM. 2410622063

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal.....

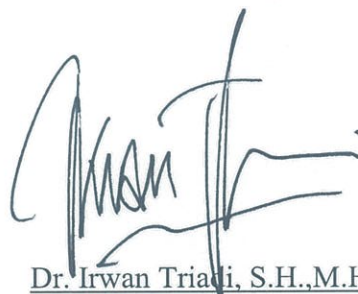
Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIP. 196005021986031003

Pembimbing 2



Dr. Irwan Triati, S.H., M.H.
NIDK. 8841840017

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

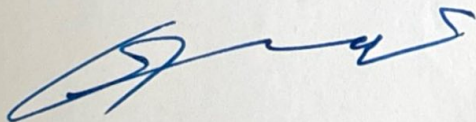
KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MENJALANI PIDANA (Studi Putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara)

Disusun dan diajukan oleh:
YULI MEGA ANGGRAENI
NIM. 2410622063

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal.....
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

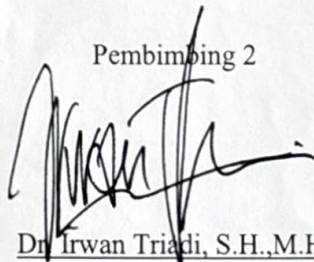
Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIP. 196005021986031003

Pembimbing 2



Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.
NIDK. 8841840017

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198910192025211048

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Saifuddin, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yuli Mega Anggraeni
NIM : 2410622063
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MENJALANI PIDANA (Studi Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Yuli Mega Anggraeni
NIM. 2410622063

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Mega Anggraeni

NIM : 2410622063

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MENJALANI PIDANA (Studi Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara)** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Yuli Mega Anggraeni
NIM. 2410622063

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Penulis berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga Penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis dengan judul KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MENJALANI PIDANA (Studi Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara). Tulisan ini dibuat guna mencukupi kriteria dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis memahami banyak pihak yang memberikan bantuan dan arahan dalam penyelesaian karya akhir ini, maka dari itu Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA. Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan;
3. Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. sebagai Pembimbing 1 dan Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing 2 yang memberikan waktu dan pemikiran untuk memberi arahan dalam teknis penulisan maupun substansi karya akhir ini;
5. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. sebagai Penguji 1 dan Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H. sebagai Penguji 2 dalam Seminar Proposal dan Seminar Hasil Tesis;

6. Orangtua Penulis Bapak Adolf Jolly Siahaan dan Mama Estirawaty Siregar, Kakak, Abang, Arka dan Joshua yang telah memberikan doa dan dukungan. Terimakasih atas cinta kasihnya;
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2024 di Program Studi Magister Hukum yang selalu saling mendukung.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penyusunan tesis ini.

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. All my life You have been faithful.

Jakarta,
Penulis,

Yuli Mega Anggraeni

ABSTRAK

YULI MEGA ANGGRAENI, NIM. 2410622063. KEPASTIAN HUKUM BANDING ADMINISTRATIF ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MENJALANI PIDANA (Studi Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara). Dibimbing oleh Taufiqurrohman Syahuri dan Irwan Triadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) apakah sudah sesuai dengan kepastian hukum serta merumuskan dan menjelaskan model putusan yang ideal terhadap pemberhentian PNS pasca menjalani pidana.

Penelitian ini masuk dalam penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Penelitian menemukan bahwa pembatalan Keputusan Bupati atas pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh BPASN mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum yang menempatkan fakta material sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga mekanisme banding administratif berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap keputusan pemberhentian yang tidak tepat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa model putusan yang ideal terhadap pemberhentian PNS pasca menjalani pidana harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta material, penerapan prinsip proporsionalitas dan pertimbangan hukum yang jelas. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh PNS seharusnya menjadi faktor evaluatif dengan tujuan pembinaan ASN, bukan otomatisasi sanksi administratif terberat. Pasal 44 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS mewajibkan PNS yang telah selesai menjalani pidana penjara untuk mengajukan pengaktifan kembali dan apabila tidak dipenuhi, PNS tersebut dapat diberhentikan dengan hormat. Terhadap pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan dapat menempuh upaya hukum berupa Banding Administratif.

Kata Kunci: Pemberhentian, Pidana, Banding Administratif.

ABSTRACT

YULI MEGA ANGGRAENI, NIM. 2410622063. **LEGAL CERTAINTY OF ADMINISTRATIVE APPEALS REGARDING DISMISSAL OF CIVIL SERVANTS AFTER SERVING A CRIMINAL SENTENCE** (A Study of the Decision of the State Civil Service Advisory Board). Supervised by Taufiqurrohman Syahuri and Irwan Triadi.

This research aims to analyze whether the decisions of the State Civil Apparatus Advisory Board (BPASN) are consistent with the principle of legal certainty, as well as to formulate and elaborate an ideal decision-making model concerning the dismissal of Civil Servants (PNS) following the completion of criminal sentences.

This research constitutes normative juridical research. The approaches employed include the normative approach, the statutory approach, and the case approach.

The research finds that the annulment by the Civil State Apparatus Advisory Board (BPASN) of the Regent's Decree concerning the dismissal of a Civil Servant (Pegawai Negeri Sipil/PNS) reflects the application of the principle of legal certainty, which places material facts as the basis for decision-making, such that the administrative appeal mechanism functions as an instrument of legal protection against improper dismissal decisions..

The research further demonstrates that the ideal decision-making model with respect to the dismissal of a Civil Servant following the serving of a criminal sentence must be grounded in a thorough examination of material facts, the application of the principle of proportionality, and clear legal reasoning. A criminal judgment that has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) and has been served by the Civil Servant concerned ought to be treated as an evaluative factor oriented toward the purposes of State Civil Apparatus (ASN) development and guidance, rather than as a trigger for the automatic imposition of the most severe administrative sanction. Article 44 of National Civil Service Agency (BKN) Regulation Number 3 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Dismissal of Civil Servants requires civil servants who have completed their term of imprisonment to apply for reactivation of their employment status. Failure to fulfill this requirement may result in dismissal with honor. In response to such dismissal, the concerned civil servant may pursue legal remedies through an Administrative Appeal.

Keywords: Dismissal, Criminal Sanction, Administrative Appeal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Teoritis	17
1. Teori Kepastian Hukum	17

2. Teori Kewenangan	21
3. Teori Proporsionalitas	24
B. Kerangka Pikir	28
C. Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Analisis Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Keputusan BPASN atas Pembatalan Pemberhentian PNS .	37
1. Kepastian Hukum dalam Pemberhentian PNS Pasca Menjalani Pidana.....	37
2. Kewenangan BPASN dalam Membatalkan Keputusan Pemberhentian.....	47
3. Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pemberhentian .	58
B. Model Putusan yang Ideal terhadap Pemberhentian PNS Pasca Menjalani Pidana	66
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------